

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. PT Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keutusan merger, bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem

dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999¹.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.1.2. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

BRISyariah adalah bank syariah ritel modern terkemuka di Indonesia yang merupakan anak usaha bank BUMN terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRISyariah berawal dari sebuah akuisisi Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin dari BI melalui surat No.10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRISyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008.²

Setelah Sembilan tahun melayani masyarakat, pada tanggal 9 Mei 2018, BRISyariah mulai melantai di Bursa Efek Indonesia

¹ <https://www.mandirisyariah.co.id>

² <https://www.brisyariah.co.id>

dan menjadi sebuah perusahaan terbuka, PT Bank BRISyariah Tbk, atau disingkat BRISyariah. Dengan aksi korporasi ini, BRISyariah menjadi bank syariah anak Bank BUMN pertama yang menjual sahamnya ke masyarakat. Seiring dengan misinya, BRISyariah memantapkan diri sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Saat ini BRISyariah makin memperkuat sinergi dengan Bank BRI selaku induk yang memiliki jaringan terluas. Salah satu bentuk penguatan sinergi diantaranya dengan memanfaatkan jaringan kerja Bank BRI dalam hal kegiatan penghimpunan dana masyarakat serta dalam penyaluran pembiayaan secara referral berdasarkan prinsip syariah. Menjadi salah satu bank syariah anak usaha BUMN terbesar di Indonesia, BRISyariah telah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan DPK dengan jumlah total asset tercatat posisi Desember 2019 sebesar Rp. 43.1 triliun. Dengan berfokus pada segmen ritel dan consumer, BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

4.1.3. PT Bank Negara Indonesia Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan Undang-undang No.10 tahun 1998, pada tanggal 29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional dengan 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan DPS yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNISyariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan didalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan juni 2010 tidak terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) dan UU N0.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 payment point³.

4.1.4. PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 mei 1992. Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha

³[https:// www.bnisyariah.co.id](https://www.bnisyariah.co.id)

muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1994, PT Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa dan terdaftar sebagai perusahaan public yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tidak hanya beroperasi di Indonesia, sejak tahun 2009 PT Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Hingga kini PT Bank Muamalat Indonesia terus bertransformasi untuk menjadi entitas yang semakin baik dengan strategi yang terarah untuk mewujudkan visi menjadi “ *The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”⁴.

4.1.5. PT Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), Bank Umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/d Para Group) melalui Mega Corpora (d/d PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juni 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah⁵.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian pada tanggal 7 November 2007,

⁴ <https://www.bankmuamalat.co.id>

⁵ <https://www.megasyariah.co.id>

pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-ny, yakni PT Bank Mega Tbk, tetapi berbeda warna. Sejak 2 november 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT. Bank Mega Syariah. Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp.400 miliar menjadi Rp.1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp. 150,050 miliar menjadi Rp.318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp. 787,204 miliar.

Sejak 16 Oktober 2008, bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya berjangka ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, pada 8 april 2009, bank mega syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH).

Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi bank mega syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.

4.1.6. PT Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah sepuluh tahun operasional Divisi/Unit Usaha Syariah, Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berpendangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan Share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diputuskan untuk menjadikan Divisi/ Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Maka tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.AHU.04317.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010⁶.

Pada saat pendirian Bank BJB Syariah memiliki modal disetor sebesar Rp. 500.000.000.000, kepemilikan saham BJB Syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sebesar Rp. 495.000.000.000 dan PT Banten

⁶ <https://www.bjbsyariah.co.id>

Global Development sebesar Rp.5.000.000.000. Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah memperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbs tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2011, berdasarkan akta No.10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM nomor HU-AH.01.10-23713 tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp.7.000.000.000, sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp.507.000.000.000 dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 495.000.000.000 dan PT Banten Global Development sebesar Rp. 12.000.000.000

Pada tanggal 28 November 2018, berdasarkan akta nomor 080 perihal pelaksanaan putusan RUPS lainnya tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank BJB Syariah menjadi sebesar Rp.1.510.890.123.995 dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 1.496.890.123.995 dan PT Banten Global Development sebesar Rp. 14.000.000.000,-

Akta pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara RUPS Lainnya nomor 080 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris R.Tendy Suwarman, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-01.03-0280781. Hingga saat ini bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135 dan telah memiliki 8 kantor

caban, 57 ATM yang tersebar di daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DK Jakarta dan 49.630 Jaringan ATM bersama.

4.1.7. PT Bank Panin Syariah

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas No.12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Bank Panin Dubai Syariah telah beberapa kali melakukan perubahan nama berturut-turut menjadi PT Bank Pasar Bersaudara Djaja, berdasarkan akta berita acara rapat No.25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setaibudhi S.H., notaris di Malang. Kemudian menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan bank perubahan kegiatan usaha dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha bank syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah islam, berdasarkan akta berita acara RUPS luar biasa No.1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sujipto ,S.H., notaris di Jakarta (<https://panindubaisyariah.co.id>)⁷

4.1.8. PT Maybank Syariah Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia atau Bank) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada tanggal 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

⁷ <https://panindubaisyariah.co.id>

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan Community Financial Service (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital banking, Maybank2U (mobile banking berbasis internet banking dan berbagai saluran lainnya).

Per 31 Desember 2018, Maybank Indonesia memiliki 386 cabang termasuk cabang syariah yang tersebar di Indonesia serta satu cabang luar negeri (Mumbai, India), 21 Mobil Kas Keliling dan 1.609 ATM termasuk CDM (*Cash Deposit Machine*) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Hingga akhir tahun 2018, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp. 116,8 triliun dan memiliki total aset senilai Rp. 177,5 triliun.

4.1.9. PT Bank Central Asia Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No.72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCASyariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pertanyaan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No.49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H tanggal 16 Desember

2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCASyariah. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance⁸.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur BI melalui keputusan Gubernur No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

4.1.10. PT Bank Victoria Syariah

PT.Bank Victoria Syariah(d/h. PT Bank Swaguna) didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Akusisi saham PT.Bank Swaguna sebesar 99,80% oleh PT.Bank Victoria International Tbk telah disetujui oleh Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2007. September 2007 bank telah meningkatkan modal disetor menjadi Rp. 90 miliar dan pada Maret 2008 modal disetor bank meningkat menjadi Rp.110 Miliar. 19 Agustus 2009 kantor pusat pindah dari Jl. Fatmawati No.85-A Jakarta Selatan Ke Permata Senayan Blok E 52-55 Jl. Tentara pelajar, Kebayoran lama, Jakarta Selatan ke Permata Senayan Blok E 52-55 Jl.Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210.

PT Bank Victoria Syariah telah mendapatkan izin operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. 1

⁸ <https://www.bcasyariah.co.id>

April 2010 beroperasi secara penuh dengan system syariah. Kantor Pusat Bank beralamat di komplek perkantoran Permata Senayan Blok E 52-55 Jl.Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210. Telp 021-57940940 (hunting) fax:021-57940941⁹.

Saat ini bank memiliki satu kantor pusat, tujuh kantor cabang, enam kantor cabang pembantu yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Serang, Bandung, Cirebon, Tegal, Solo dan Denpasar.

4.1.11. PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin TBK,. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sbelumnya bernama PT Bank Swansarindo International didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasrkan Akta No 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia No 24/1/UPBD/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari BI No5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta No.109 tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asisten oleh PT Bank Bukopin Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha

⁹ <https://victoriasyariah.co.id>

bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh bapak M.Jusuf Kalla, wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 11 kantor cabang, 7 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 1 unit mobil kas keliling, dan 76 kantor layanan syariah, serta 27 mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin¹⁰.

4.3. Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Kuartal I Tahun 2014- Kuartal III Tahun 2019

4.3.1. Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Berdasarkan Data Envelopment Analysis (DEA)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode DEA dengan asumsi CRS (*Constant Return Scale*) menggunakan software DEAP 2.1 dapat dilihat tingkat efisiensi dari 11 BUS yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 : Efisiensi Bank Umum Syariah tahun 2014 - 2019

Kode Bank	Tahun						MEAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
BSM	79%	74%	78%	92%	75%	67%	77%
BRIS	88%	82%	82%	96%	79%	71%	83%
BNIS	94%	82%	82%	94%	81%	71%	84%
BMI	83%	85%	78%	90%	76%	71%	80%

¹⁰ <https://www.bukopinsyariah.co.id>

BMS	94%	93%	93%	90%	90%	75%	89%
BJBS	94%	92%	93%	100%	93%	80%	92%
BPS	100%	100%	88%	100%	86%	75%	91%
MSI	100%	93%	100%	83%	100%	100%	96%
BCAS	100%	100%	93%	90%	93%	87%	94%
BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BSB	100%	98%	100%	96%	100%	100%	99%
RATA- RATA	94%	91%	90%	94%	88%	81%	

Sumber : DEAP 2.1, Data diolah peneliti

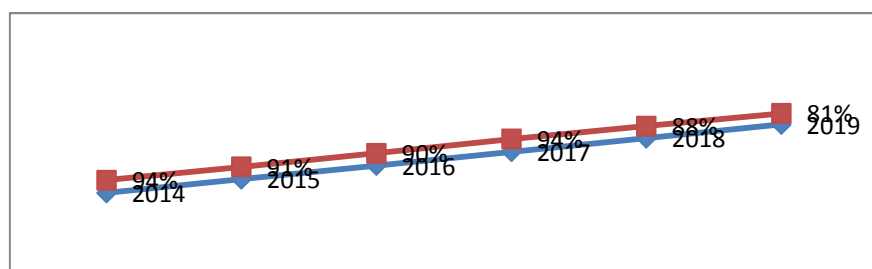
Tabel 4.9 menunjukkan tingkat efisiensi rata-rata bus yang ada di Indonesiaa belum mencapai tingkat efisiensi teknik 100% yaitu Bank Victoria Syariah. Sementara Bank umum Syariah yang tingkat efisiensinya belum mencapai efisiensi sempurna dan mengalami fluktuasi yaitu Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Maybank Syariah Indonesia,BCA Syariah,Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, BNI Syariah,BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Perhitungan dengan menggunakan DEA menghasilkan tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia sebagian besar mengalami fluktuasi dan cenderung tidak stabil. Dari tabel 4.9 masih ada beberapa Bank Umum Syariah yang belum dapat mencapai tingkat efisiensi sempurna.Pada tahun 2014, bank syariah yang belum mencapai efisiensi yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Selanjutnya tahun 2015, bank yang belum mencapai efisiensi yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin.

Tahun 2016 bank syariah yang belum mencapai efisiensi yaitu, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, dan BCA Syariah. Sedangkan pada tahun 2017 yaitu, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Maybank Syariah Indonesia, BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin. Selanjutnya bank syariah yang belum mencapai efisiensi pada tahun 2018 yaitu, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, dan BCA Syariah. Terakhir pada tahun 2019 bank syariah yang belum mencapai efisiensi sempurna yaitu, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah. Meskipun bank-bank syariah tersebut belum dapat mencapai tingkat efisiensi sempurna tetapi tingkat efisiensinya masih dikategorikan sedang sampai dengan tinggi.

Tingkat efisiensi dari masing-masing bank syariah telah ditampilkan, berikut ini grafik gabungan efisiensi BUS selama periode penelitian tahun 2014 sampai dengan 2019 serta tingkat efisiensi rata-rata selama periode tersebut.

Grafik 4.6 : Efisiensi Gabungan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014 - 2019



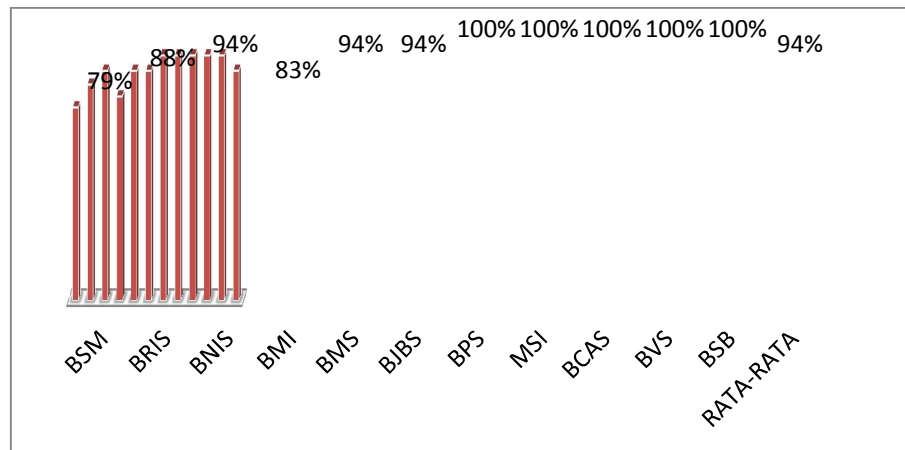
Sumber : olah data DEAP 2.1

Hasil pengukuran efisiensi menggunakan DEA pada grafik 4.9 dapat dilihat tingkat efisiensi gabungan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2014 tingkat efisiensi Bank Umum Syariah sebesar 94% mengalami penurunan tingkat efisiensi pada tahun 2015 menjadi sebesar 91%. Pada tahun 2016 Bank Umum Syariah kembali mengalami penurunan tingkat efisiensi namun tidak terlalu signifikan menjadi 90%. Kemudian tingkat efisiensi Bank Umum Syariah mulai membaik pada tahun 2017 terlihat dari *score* efisiensi yang diperoleh meningkat sebesar 94%. Pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan tingkat efisiensi yang cukup signifikan sebesar 88% dan 81%.

Hasil tingkat efisiensi pertahun selama tahun 2014 sampai tahun 2019, diperoleh rata-rata efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode penelitian sebesar 94%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia masih dikategorikan tinggi karena berada pada kisaran nilai efisiensi 81-99%. Walaupun tingkat efisiensinya tidak dapat mencapai tingkat efisiensi sempurna 100%, namun tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia masih dikategorikan aman karena rata-rata tingkat efisiensinya masih berada dikategori tinggi.

Tingkat efisiensi rata-rata Bank Umum Syariah dikategorikan aman, akan tetapi masih ada beberapa bank syariah yang tingkat efisiensinya berada dibawah rata-rata tingkat efisiensi Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019.

Grafik 4.6 : Efisiensi Rata-rata Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014 - 2019



Grafik 4.6 dapat dilihat bahwa ada beberapa Bank Syariah yang tingkat efisiensinya masih dibawah rata-rata tingkat efisiensi Bank Umum Syariah sebesar 94% selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Adapun bank syariah yang tingkat efisiensinya masih dibawah rata-rata tingkat efisiensi Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014 sampai tahun 2019 yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Mega Syariah. Sedangkan Bank Panin Syariah, Maybank Syariah Indonesia, BCA Syariah, bank Victoria Syariah tingkat efisiensinya sudah mencapai tingkat efisiensi sempurna 100%.

4.3.2. Analisis Input dan Output yang menyebabkan Inefisiensi pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2018

Data hasil tingkat efisiensi Bank Umum Syariah selama tahun 2014 sampai dengan September 2019, terdapat bank syariah yang masih belum efisien. Sesuai dengan pertanyaan pada permasalahan faktor apa saja yang mempengaruhi inefisiensi Bank Umum Syariah selama tahun 2014 sampai September 2019, maka pada sub bab ini akan dianalisis input dan outputnya saja menyebabkan bank syariah belum efisien 100%.

Pada perhitungan DEA tidak hanya mengukur nilai efisiensi Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian, tetapi juga memberikan referensi atau acuan bagi bank yang berada dalam

BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BSB	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Olah data DEAP 2.1, diolah peneliti

Bank Syariah mandiri mengalami Inefisiensi pada output pembiayaan, pendapatan operasional lainnya, dan input beban operasional, total aset. Ketidakefisienan input terjadi karena penggunaannya yang kurang maksimal. Pengurangan pada input beban operasional dan total aset sebesar 12,31% dan 20,83%. Untuk mencapai efisiensi yang sempurna target efisiensi Output pembiayaan dapat diupayakan dengan peningkatan efisiensi sebesar 11,66%. Pendapatan operasional juga dapat diupayakan sebesar 26,70% dari target pendapatan operasional yang seharusnya dicapai.

BRI Syariah mengalami inefisiensi pada output pembiayaan, pendapatan operasional lainnya dan input total aset. Untuk mencapai efisiensi yang sempurna BRI Syariah harus melakukan pengurangan pada variabel input total aset sebesar 26,67% dan mengupayakan peningkatan pada variabel output pembiayaan sebesar 45,66% dan pendapat operasional sebesar 13,30%.

BNI Syariah mengalami inefisiensi pada output pembiayaan dan pendapatan operasional dan ketiga inputnya. Ketidakefisienan input beban operasional terjadi karena pemborosan alokasi beban operasional, sehingga dibutuhkan pengurangan sebesar 89,33%. Pada total aset dibutuhkan peningkatan sebesar 6,67%. Sedangkan untuk DPK dapat dilakukan pengurangan sebesar 33,33% disertai peningkatan pada pembiayaan sebesar 20,20% dan pendapatan operasional sebesar 96,67%.

Bank Muamalat Indonesia mengalami inefisiensi pada input beban operasional, total aset dan kedua outputnya. Upaya peningkatan efisiensi efisiensi dapat dilakukan dengan

pengurangan pada input beban tenaga kerja dan total aset sebesar 10,00% dan 2,00%. Dan peningkatan sebesar 20,00% dan 2,00% pada masing-masing outputnya. Bank Mega Syariah mengalami inefisiensi pada input beban operasional total aset dan kedua outputnya. Inefisiensi ini terjadi karena input beban operasional mengalami pemborosan dalam penglokasiannya. dibutuhkan pengurangan sebesar 12,72% untuk mencapai efisiensi sempurna pada input beban dan pengurangan sebesar 33,33% pada input total aset. Sedangkan untuk output pembiayaan dan pendapatan operasional dapat upayakan peningkatan sebesar 11,33% dan 6,70%. Bank selanjutnya yang mengalami inefisiensi adalah Bank Jabar Banten Syariah yang mengalami inefisiensi pada input total aset dan output pembiayaan dan pendapatan operasional. Untuk dapat mencapai efisiensi sempurna dapat diupayakan peningkatan sebesar 67,78% pada pembiayaan dan 6,70% pada pendapatan operasional lainnya serta pengurangan pada total aset sebesar 1,11%.

2. Analisis inefisiensi input dan output tahun 2015

Kode Bank	Score Efisiensi	Output		Input		
		PYD	Pendapatan Opr	DPK	Beban Opr	Aset
BSM	74%	98,57%	19,85%	-28,57%	-43,45%	18,75%
BRIS	82%	50,71%	21,42%	100%	-2,86%	-10,95%
BNIS	82%	10,23%	14,28%	100%	-11,69%	-10,95%
BMI	85%	19,54%	18,18%	-3,00%	-14,00%	100%
BMS	93%	11,42%	7,14%	100%	-22,08%	-15,81%
BJBS	92%	-9,08%	11,82%	-4,54%	-3,03%	100%
BPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MSI	93%	33,93%	7,14%	100%	-14,29%	-2%
BCAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BSB	98%	2,27%	12,50%	-2,69%	100%	-4,81%

Sumber: Olah data DEAP 2.1, diolah peneliti

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah bank umum syariah yang inefisiensi menjadi delapan bank, setelah pada tahun 2014 enam bank yang mengalami inefisiensi. Bank yang mengalami inefisiensi yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Bukopin. Dimulai dari Bank Syariah Mandiri yang mengalami inefisiensi pada ketiga inputnya dan output pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya. Inefisiensi ini terjadi disebabkan tidak tercapainya output pembiayaan dan pendapatan operasional yang seharusnya mencapai target untuk itu, perlu adanya peningkatan sebesar 98,57% pada pembiayaan dan 19,85% pada pendapatan operasional. Untuk variabel input Bank Syariah Mandiri perlu mengurangi penggunaan inputnya sebesar 28,57% pada DPK, dan sebesar 43,45% pada beban operasional, serta peningkatan sebesar 18,75% pada total aset. Bank Syariah yang inefisiensi berikutnya adalah BRI Syariah yang disebabkan pemborosan pada input beban operasional lainnya sehingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 2,86%, dan total aset sebesar 10,95%, sedangkan untuk outputnya perlu ditingkatkan sebesar 50,71% untuk pembiayaan dan 14,28% untuk pendapatan operasional lainnya.

BNI Syariah mengalami inefisiensi disebabkan oleh kelebihan penggunaan dari input beban operasional dan total aset sehingga BNI Syariah perlu mengurangi penggunaan inputnya sebesar 11,69% (beban operasional) dan 10,95% (total aset). Sedangkan untuk outputnya BNI Syariah perlu meningkatkan sebesar 10,23% (Pembiayaan) dan 14,28% (pendapatan Operasional). Inefisiensi Bank Umum Syariah selanjutnya adalah Bank Muamalat Indonesia mengalami inefisiensi pada semua inputnya kecuali total aset, dan kedua outputnya. Bank Muamalat Indonesia mengalami inefisiensi disebabkan oleh kelebihannya

target efisiensi dari masing-masing input sehingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 3,00 (DPK) dan 14,00% (beban operasional lainnya) dan juga pada output perlu ditingkatkan sebesar 19,54% (Pembiayaan) dan 18,18% (pendapatan operasional lainnya) untuk dapat mencapai efisiensi sempurna. Bank Mega Syariah mengalami inefisiensi pada input beban operasional lainnya, total aset dan output pembiayaan serta pendapatan operasional lainnya. Pada input beban operasional lainnya dan total aset perlu dilakukan pengurangan sebesar 22,08%, dan 15,81%. Sedangkan pada outputnya perlu dilakukan peningkatan sebesar 11,42% dan 7,145.

Bank berikutnya yang mengalami inefisiensi adalah Bank Jabar Banten Syariah yang hanya memiliki score efisiensi sebesar 92%, disebabkan adanya kelebihan target efisiensi pada inputnya yaitu DPK dan beban operasional lainnya sehingga dilakukan pengurangan sebesar 4,545 dan 3,03%. Sedangkan outputnya pembiayaan terjadi kelebihan penyaluran pembiayaan dari target efisiensi sehingga perlu dilakukan pengurangan sebesar 9,08% dan peningkatan sebesar 11,82% pada pendapatan operasional lainnya. Maybank Syariah Indonesia mengalami inefisiensi disebabkan adanya pemborosan pada beban operasional lainnya sehingga diperlukan pengurangan sebesar 14,29% dan sebesar 2,00% pada total aset, sedangkan outputnya perlu ditingkatkan sebesar 33,935 dan 7,14% untuk mencapai efisiensi optimum. Bank Syariah Bukopin mengalami inefisiensi pada variabel input DPK dan Total aset dan kedua outputnya. Untuk mencapai efisiensi optimum perlu dilakukan pengurangan pada input sebesar 2,69% dan 4,81% dan untuk outputnya ditingkatkan sebesar 2,27% dan 12,50%.

3. Analisis inefisiensi input dan output tahun 2016

Kode Bank	Score Efisiensi	Output		Input		
		PYD	Pendapatan Opr	DPK	Beban Opr	Aset

BSM	78%	11,85%	28,57%	-90 %	-25%	-19,64%
BRIS	82%	50,71%	12,70%	100%	-15%	-19,05%
BNIS	82%	30,47%	21,43%	100%	-15%	-19,05%
BMI	78%	22,14%	28,57%	100%	-25%	-14,29%
BMS	93%	11,42%	7,14%	100%	-37,5%	-17,58%
BJSB	93%	78,57%	7,14%	100%	-25,%	-10,72%
BPS	88%	46,94%	26,99%	100%	100%	-18,36%
MSI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BCAS	93%	19,04%	7,14%	-6,67%	-25,%	-17,58%
BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BSB	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Olah Data DEAP.2.1

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah Bank yang mengalami inefisien, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRISyariah, BNISyariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah dan BCASyariah. Tabel 4.4 Bank Mandiri Syariah tidak menggunakan semua inputnya secara maksimal hal ini terlihat dengan jumlah variabel input yang tidak sesuai target inputnya. Jumlah input DPK harus dikurangi sebesar 90%, beban operasional sebesar 25% dan total aset sebesar 19,64%. Disisi lain, output Bank Syariah Mandiri harus dilakukan upaya peningkatan efisiensi sebesar 11,85% (Pembiayaan) dan 28,57% (Pendapatan Operasional Lainnya). BRISyariah mengalami Inefisiensi pada input beban operasional dan total aset. Inefisiensi input ini disebabkan karna melebihi target input, maka BRISyariah harus mengurangi inputnya sebesar 15% (Beban Operasional Lainnya) dan 19,5% (Total Aset). Kedua output BRISyariah juga mengalami inefisiensi dengan meningkatkan 50,71% (Pembiayaan) dan 12,70% (Pendapatan Operasional Lainnya). Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Umum Syariah yang tingkat efisiensinya paling rendah ditahun 2016. Ketidakefisienan Bank Muamalat Indonesia pada semua inputnya kecuali DPK. Input Bank Muamalat Indonesia harus melakukan

pengurangan input sebesar 25% (Beban Operasional Lainnya) dan 14,29% (total aset). Bank Muamalat Indonesia harus meningkatkan outputnya sebesar 22,14% (Pembiayaan) dan 28,57% (Pendapatan Operasional).

Bank selanjutnya adalah Bank Mega Syariah yang mengalami inefisiensi pada inputnya. Ketidakefisienan input ini Bank Mega Syariah harus melakukan pengurangan input sebesar 37,50% (Beban Operasional Lainnya) dan 17,58% (Total Aset). Bank Mega Syariah perlu meningkatkan outputnya sebesar 11,42% (Pembiayaan) dan 7,14% (pendapatan Operasional Lainnya).

Bank Jabar Banten Syariah mengalami Inefisiensi disebabkan pemborosan pada input beban Operasional lainnya yang melebihi target efisiensi. Untuk itu perlu dilakukan pengurangan sebesar 25% (Beban Operasional Lainnya) dan 10,72% (total aset). Untuk mencapai efisiensi kedua output Bank Jabar Banten Syariah perlu dilakukan peningkatan sebesar 78,57% (pembiayaan) dan 7,14% (pendapatan Operasional Lainnya). Bank Panin Syariah mengalami inefisiensi pada kedua outputnya. Ketidakefisienan terjadi karena tidak sesuai dengan target outputnya. Maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan efisiensi sebesar 46,94% (pembiayaan) 26,99% (pendapatan Operasional Lainnya) dan dilakukan pengurangan pada input total aset sebesar 18,36%.

Bank Umum Syariah terakhir yang mengalami inefisiensi ditahun 2016 adalah BCASyariah. Ketidakefisienan ini terjadi pada semua inputnya yang tidak sesuai dengan target inputnya. BCASyariah perlu mengurangi inputnya sebesar 6,67% (DPK), 25% (Beban Operasional Lainnya) dan 17,58% (total aset). Sedangkan untuk outputnya BCASyariah perlu meningkatkan sebesar 19,4% (Pembiayaan) dan 7,14% (pendapatan Operasional Lainnya).

4. Analisis inefisiensi input dan output tahun 2017

Kode Bank	Score Efisiensi	Output		Input		
		PYD	Pendapatan Opr	DPK	Beban Opr	Aset
BSM	92%	28,00%	1%	100%	100%	-2,86%
BRIS	96%	11,11%	4,58%	70,00%	-2,78%	-5,98%
BNIS	94%	18,00%	6,59%	100%	100%	-3,08%
BMI	90%	20,00%	10,59%	-8,33%	100%	100%
BMS	90%	14,00%	11,73%	100%	100%	-1,67%
BJBS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MSI	83%	20,00%	20,00%	100%	100%	100%
BCAS	90%	14,00%	11,73%	100%	100%	-1,67%
BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BSB	98%	4,76%	4,76%	-4,80%	-3,30%	100%

Sumber: Olah data DEAP.2.1

Pada tahun 2017 jumlah Bank yang inefisiensi tidak ada perubahan dari 11 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebanyak 8 BUS yang mengalami inefisiensi. Bank Mandiri Syariah mengalami inefisiensi pada input total aset dan kedua outputnya. Untuk mencapai efisiensi optimum Bank Mandiri Syariah harus meningkatkan pembiayaannya sebesar 28% dan 1% (pendapatan Operasional Lainnya), dan mengurangi input sebesar 2,86% (total aset). BRISyariah mengalami inefisiensi pada semua input dan outputnya. Supaya efisiensinya tercapai maka dibutuhkan peningkatan pada outputnya sebesar 18% (Pembiayaan) dan 1% (Pendapatan Operasional Lainnya) serta peningkatan pada input DPK sebesar 70% dan pengurangan sebesar 2,78% (Beban Operasional Lainnya) dan 5,98% (total aset). BNI Syariah mengalami inefisiensi ada inputnya untuk itu dilakukan pengurangan sebesar 3,08% (total aset) dan peningkatan pada output sebesar 18% (Pembiayaan) dan 6,59% (Pendapatan Operasional Lainnya). Bank Muamalat Indonesia mengalami

inefisiensi pada input DPK dan kedua outputnya. Diperlukan pengurangan pada input sebesar 8,33% (DPK) dan peningkatan pada output sebesar 20% (Pembiayaan) dan 10,59% (Pendapatan Operasional lainnya). Bank selanjutnya yang mengalami inefisiensi adalah Bank Mega Syariah disebabkan oleh tidak tercapainya target input dan outputnya, maka diperlukan pengurangan sebesar 1,67% (total aset) serta peningkatan sebesar 14% (pembiayaan) dan 11,73% (Pendapatan Operasional Lainnya) pada outputnya.

Maybank Syariah Indonesia mengalami inefisiensi disebabkan oleh kedua outputnya yang tidak sesuai target. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan sebesar 20% pada masing-masing outputnya. BCASyariah mengalami inefisiensi pada kedua outputnya dan input total aset. Untuk dapat mencapai efisiensi maka dibutuhkan peningkatan output sebesar 14% (pembiayaan) dan 11,73% (Pendapatan Operasional Lainnya) dan pengurangan pada inputnya sebesar 1,67%. Bank terakhir yang mengalami inefisiensi di tahun 2017 adalah Bank Syariah Bukopin yang mengalami inefisiensi pada kedua outputnya dikarenakan tidak sesuai target output yang diharapkan. Supaya mencapai efisiensi optimun diperlukan peningkatan sebesar 4,76% pada masing-masing outputnya serta pengurangan sebesar 4,80% (DPK) dan 3,30% (Beban operasional lainnya) pada inputnya.

5. Analisis inefisiensi input dan output tahun 2018

Kode Bank	Score Efisiensi	Output		Input		
		PYD	Pendapatan Opr	DPK	Beban Opr	Aset
BSM	75%	10,88%	34,00%	100%	100%	-2,00%
BRIS	79%	46,66%	26,00%	100%	100%	-9,25%
BNIS	81%	28,93%	24,00%	100%	100%	-15,75%
BMI	76%	20,60%	32,00%	100%	100%	-8,50%

BMS	90%	76,00%	8,00%	-26,67%	100%	-7,00%
BJBS	93%	-37,88%	2,06%	100%	100%	-7,00%
BPS	86%	58,86%	16,00%	100%	100%	-5,23%
MSI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BCAS	93%	17,33%	8,00%	-26,67%	44,44%	-14,15%
BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BSB	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Olah Data DEAP.2.1

Bank Mandiri Syariah adalah Bank Umum Syariah yang mengalami inefisiensi paling rendah. Inefisiensi terjadi pada kedua outputnya dan input total aset. Kedua output Bank Mandiri Syariah belum mencapai target efisiensi sehingga perlu diupayakan peningkatan output sebesar 10,88% (Pembiayaan) dan 34% (Pendapatan Operasional Lainnya). Dan pengurangan pada input total aset sebesar 2%. BRISyariah mengalami inefisiensi pada input total aset yang melebihi target efisiensi dan kedua outputnya yang belum mencapai efisiensi. Uoaya untu meningkatkan efisiensi BRISyariah dapat melakukan peningkatan sebesar 46,66% (Pembiayaan) dan 26% (Pendapatan Operasional Lainnya) dan pengurangan sebesar 9,25% (total aset). BNISyariah mengalami inefisiensi pada inputnya total aset dan kedua outputnya. Untuk mencapai efisiensi optimum diperlukan pengurangan pada inputnya sebesar 15,75% dan peningkatan sebesar 28,93% (Pembiayaan) dan 24% (Pendapatan Operasional Lainnya). Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Umum Syariah yang mengalami inefisiensi terendah kedua setelah Bank Syariah Mandiri. Inefisiensi ini disebabkan target input dan outputnya. Agar mencapai efisiensi optimum Bank Muamalat Syariah perlu meningkatkan kedua outputnya sebesar 20,60% (Pembiayaan) dan 32% (Pendapatan Operasional Lainnya) dan Pengurangan inputnya sebesar 8,50%.

Bank selanjutnya yang mengalami inefisiensi adalah Bank Mega Syariah yang mengalami inefisiensi pada inputnya dan outputnya. Inefisiensi pada inputnya disebabkan melebihi dari target efisiensi. Untuk itu diperlukan pengurangan sebesar 26,67% (DPK) dan 7% (total aset) sedangkan inefisiensi pada outputnya terjadi karena belum tercapainya target efisiensi sehingga diperlukan 76% (Pembiayaan) dan 8% (Pendapatan Operasional Lainnya). Inefisiensi terjadi pada Bank Jabar Banten Syariah yang mengalami inefisiensi pada total aset dan output pembiayaan dan Pendapatan Operasional Lainnya. Bank Panin Syariah mengalami inefisiensi pada input aset dan kedua outputnya. Sehingga diperlukan pengurangan sebesar 58,86% (Pembiayaan) dan 16% (Pendapatan Operasional Lainnya) serta pengurangan sebesar 5,23% pada input total aset.

Bank terakhir yang mengalami inefisiensi adalah BCASyariah. Inefisiensi ini disebabkan tidak optimalnya dalam penggunaan input dan outputnya. Untuk mencapai efisiensi optimum diperlukan peningkatan pada output dan inputnya sebesar 17,33%(pembiayaan) dan 8% (Pendapatan Operasional Lainnya), 44,44% (total aset) serta pengurangan pada inputnya sebesar 26,67% (DPK) dan sebesar 14,15% (total aset).

6. Analisis inefisiensi input dan output tahun 2019

Kode Bank	Score Efisiensi	Output		Input		
		PYD	Pendapatan Opr	DPK	Beban Opr	Aset
BSM	67%	11,00%	50,00%	100%	-12,50%	-62,50%
BRIS	71%	46,66%	41,67%	100%	-17,36%	-64,58%
BNIS	71%	27,77%	41,67%	100%	-9,85%	-64,58%
BMI	71%	18,33%	41,67%	100%	-23,72%	-64,58%
BMS	75%	11,33%	33,33%	-31,25%	-22,23%	-58,98%
BJBS	80%	66,67%	25,00%	100%	-2,78%	-61,54%
BPS	75%	-76,19%	33,33%	100%	-15,15%	-58,98%

MSI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BCAS	87%	15,39%	15,39%	100%	-21,33%	-38,19%
BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
BSB	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DEAP 2.1, data diolah

Berdasarkan tabel diatas Bank Syariah Mandiri mengalami inefisiensi pada input dan outputnya. Alokasi penggunaan beban operasional dan total aset terjadi pemborosan sehingga melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan inefisiensi pada output disebabkan karena total pembiayaan yang disalurkan masih kurang dari target yang seharusnya disalurkan dan Pendapatan Operasional Lainnya yang dihasilkan masih kurang dari target yang seharusnya dicapai. Inefisiensi pada BRISyariah terjadi pada input dan beban operasional lainnya total aset. Input beban operasional lainnya total aset yang disebabkan terjadinya pemborosan pada penggunaan beban operasional lainnya total aset. Sementara inefisiensi yang terjadi pada variabel output disebabkan karena output total pemiaanya yang disalurkan dan pendapatan operasional lainnya yang dihasilkan masih belum maksimal.

BNI Syariah mengalami inefisiensi pada variabel input beban operasional lainny dan total aset. Inefisiensi pada varibel input terjadi karena beban operasional lainnya total aset yang digunakan masih lebih besar dibandingkan targetnya. Sementara inefisiensi pada variabel output total pemiaanya dan pendapatan operasional lainnya belum maksimal. Agar BNISyariah dapat mencapai tingkat efisiensi sempurna maka variabel input dan output yang perlu diperbaiki yaitu dengan mengurangi penggunaan beban operasional dan total aset dan meningkatkan total pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya. Bank Muamalat Indonesia mengalami inefisiensi pada input beban operasional lainnya dan total aset. Inefisiensi input ini disebabkan karena melebihi dari target efisiensi yang ditentukan dan kurang dari

target output yang diharapkan. Untuk mencapai efisiensi optimum Bank Muamalat Indonesia harus mengurangi input beban operasional lainnya dan total aset serta menambah penyaluran pembiayaan dan pendapatan operasional.

Bank Mega Syariah mengalami inefisiensi di semua inputnya dan outputnya. Input DPK mengalami inefisiensi karena melebihi dari target efisiensi yang ditentukan dan tidak disertai peningkatan pada penyaluran pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya. Sedangkan pada input beban operasional lainnya dan total aset mengalami kelebihan target efisiensi. Bank Jabar Banten Syariah mengalami inefisiensi pada output pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya dan input beban operasional lainnya dan total aset. Inefisiensi disebabkan oleh penyaluran pembiayaan, beban operasional lainnya dan total aset yang melebihi dari target efisiensi yang ditentukan dan tidak disertai peningkatan pada output pendapatan operasional lainnya. Bank selanjutnya yang mengalami inefisiensi adalah Bank Panin Syariah yang disebabkan oleh pemborosan pada input beban operasional lainnya, total aset dan output pembiayaan tetapi tidak disertai peningkatan pada output pendapatan operasional lainnya.

Bank terakhir yang mengalami inefisiensi paling tinggi adalah BCASyariah yang disebabkan tidak optimalnya penggunaan beban operasional lainnya dan total aset. Sedangkan outputnya masih belum mencapai target efisiensi. Untuk dapat mencapai efisiensi optimum BCASyariah harus mengurangi input beban operasional, total aset dan output pembiayaan serta meningkatkan output pendapatan operasional lainnya.

4.3.4. Bank Acuan Bagi Bank-Bank yang Inefisiensi Selama Periode 2014 – 2019

Perhitungan dengan metode DEA tidak hanya mengukur efisiensi dari masing-masing sampel bank yang diteliti, tetapi juga

memberikan referensi atau acuan bagi bank yang berada dalam kondisi inefisiensi menjadi efisien¹¹. Bank-bank yang inefisiensi diharapkan mengacu kepada bank yang telah efisien dengan menggunakan bobot input-output yang telah ditetapkan. Hasil output dari perhitungan DEA dengan bantuan *software* DEAP 2.1 telah membarikan referensi atau acuan bagi bank-bank yang mengalami inefisiensi setiap tahunnya selama periode 2014-2019.

Tabel 4.5 Menunjukkan bank-bank yang belum efisien pada tahun 2014 diharapkan mengacu kepada bank-bank yang telah efisien berdasarkan Benchmark dan lambda yang telah ditentukan. Benchmark adalah bank yang dijadikan acuan bagi bank Umum Syariah yang inefisiensi, sedangkan lambda adalah bobot input dan output yang hendak digunakan untuk mencapai efisiensi 100 persen.

Tabel 4.5 : Bank Acuan Bagi BUS yang Inefisiensi tahun 2014

Kode Bank	Score Efisiensi	Benchmark (Lambda)
BSM	79%	BVS (1.267)
BRIS	88%	BVS (0.933) BCAS(0.200)
BNIS	94%	BVS (1.067)
BMI	83%	BVS(1.200)
BMS	94%	BVS(1.067)
BJBS	94%	BCAS(0.600) BVS(0.467)
BPS	100	BPS (1.000)
MSI	100	BVS(1.000)
BCAS	100	BCAS(1.000)
BVS	100	BVS (1.000)

¹¹ Muharram,H dan Pusvitasi,R,” *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data envelopment analysis*:, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol.II, no.3 (2005)

BSB	100	BSB (1.000)
-----	-----	-------------

Berdasarkan tabel 4.5 Untuk mencapai tingkat efisiensi 100persen disarankan bank Umum Syariah yang inefisiensi mengacu kepada benchmark dan lambda yang telah ditetapkan. Bank Syariah mandiri hendaknya menggunakan input-output Bank Victoria Syariah 1.267. Sedangkan BRISyariaah hendaknya menggunakan input output 0.933 Bank Victoria Syariah dan 0.200 BCASyariah. BNISyariah hendaknya menggunakan input-outputnya 1.067 Bank Victoria Syariah. Bank Muamalat Indonesia hendaknya mengacu kepada Bank Victoria Syariah dengan menggunakan input output 1.200. Sedangkan Bank Mega Syariah hendaknya menggunakan 1.067 input-output Bank Victoria Syariah. Bank Jabar Banten Syariah hendaknya mengacu pada Bank Victoria Syariah dan BCASyariah dengan menggunakan input output 0.600 input-output BCAS dan 0.467 input output Bank Victoria Syariah.

Tabel 4.6 Menunjukkan bahwa di tahun 2015 hanya terdapat satu Bank Umum Syariah yang menjadi acuan bagi Bank Umum Syariah yang mengalami inefisiensi yaitu Bank Victoria Syariah. Bank Umum Syariah yang inefisiensi di tahun 2015 hendaknya mengacu kepada *benchmark dan Lambda* yang telah ditentukan untuk mencapai tingkat efisiensi 100 persen.

Tabel 4.6 : Bank Acuan Bagi BUS yang Inefisien tahun 2015

Kode Bank	Score Efisiensi	Benchmark (Lambda)
BSM	74%	BVS (1.357)
BRIS	82%	BVS (1.214)
BNIS	82%	BVS (1.214)
BMI	85%	BVS (1.182)

BMS	93%	BVS (1.071)
BJBS	92%	BCAS (1.091)
BPS	100%	BPS (1.000)
MSI	93%	BVS (1.071)
BCAS	100%	BVS (1.000)
BVS	100%	BVS (1.000)
BSB	98%	BVS (1.000)

Tahun 2016 terdapat 2 Bank Umum Syariah yang menjadi acuan bagi Bank Umum Syariah yang mengalami inefisiensi yaitu Bank Victoria Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Tabel 4.6 Menunjukkan bahwa bank-bank yang inefisiensi agar mengacu kepada benchmark dan lambda yang telah ditentukan.

Tabel 4.7 : Bank Acuan Bagi BUS yang Inefisiensi tahun 2017

Kode Bank	Score Efisiensi	Benchmark (Lambda)
BSM	78%	BVS (1.286)
BRIS	82%	BVS (1.214)
BNIS	82%	BVS (1.214)
BMI	78%	BVS(1.286)
BMS	93%	BVS(1.071)
BJBS	93%	BVS (1.071)
BPS	88%	BVS (1.143)
MSI	100%	BVS (1.000)
BCAS	93%	BVS(1.071)
BVS	100%	BVS (1.000)
BSB	100%	BSB (1.000)

Tahun 2017 jumlah bank yang menjadi acuan tidak mengalami perubahan yaitu dua Bank Umum Syariah namun

dengan komposisi yang berebda, terdiri dari Bank Victoria Syariah dan Bank Panin Syariah. Tabel 4.7 Menunjukkan bechmarkdan lambda bagi Bank Umum Syariah yang mengalami inefisiensi dan diharapkan mengacu pada Bank Umum Syariah yang telah ditetapkan sebagai referensinya.

Tabel 4.8 : Bank Acuan bagi BUS yang Inefisien tahun 2017

Kode Bank	Score Efisiensi	Benchmark (Lambda)
BSM	92%	BVS (0.480) BPS (0.800)
BRIS	96%	BPS (1.111)
BNIS	94%	BVS (0.380) BPS(0.800)
BMI	90%	BVS(0.200)BPS (0.800)
BMS	90%	BVS(0.740) BPS (0.400)
BJBS	100%	BJBS(1.000)
BPS	100%	BPS(1.000)
MSI	83%	BVS(1.200)
BCAS	90%	BVS(0.740) BPS(0.400)
BVS	100%	BVS (1.000)
BSB	96%	BPS(0.524) BPS(0.524)

Pada tahun 2018 jumlah Bank Umum Syariah yang menjadi acuan bertambah menjadi 3 BUS yang terdiri dari Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah dan Bank Victoria Syariah. Benchmark beserta lambda-nya bagi BUS yang inefisiensi ditunjukkan pada tabel 4.8.

Tabel 4.9 : Bank Acuan bagi BUS yang Inefisien tahun 2018

Kode Bank	Score Efisiensi	Benchmark (Lambda)
BSM	75%	MSI (0.760) BPS (0.580)

BRIS	79%	BVS(0.620) MSI(0.640)
BNIS	81%	BVS (0.880) MSI(0.360)
BMI	76%	BVS(0.840)MSI(0.500)
BMS	90%	BVS(0.740) BPS (0.400)
BJBS	93%	MSI(0.120) BVS(0.960)
BPS	86%	MSI(0.240) BVS(0.920)
MSI	100%	MSI(1.000)
BCAS	93%	MSI(0.120)BVS(0.960)
BVS	100%	BVS (1.000)
BSB	100%	BSB(1.000)

Pada tahun 2019 BUS yang menjadi acuan berkurang menjadi dua BUS yang terdiri dari Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah Indonesia. Tabel 4.9 Menunjukkan bechmarkdan lambda bagi Bank Umum Syariah yang mengalami inefisiensi dan diharapkan mengacu pada Bank Umum Syariah yang telah ditetapkan sebagai referensinya.

Tabel 5.1 : Bank Acuan bagi BUS yang Inefisien tahun 2019

Kode Bank	Score Efisiensi	Benchmark (Lambda)
BSM	67%	MSI (1.500)
BRIS	71%	MSI(1.417)
BNIS	71%	MSI(1.417)
BMI	71%	MSI(1.417)
BMS	75%	MSI(1.333)
BJBS	80%	MSI(1.250)
BPS	75%	MSI(1.333)
MSI	100%	MSI(1.000)
BCAS	87%	BVS(0.577) MSI (0.577)
BVS	100%	BVS (1.000)

BSB	100%	BSB(1.000)
-----	------	------------

4.3.4. Rekapitulasi Tingkat Efisiensi BUS Selama Periode 2014-2019

Tabel 5.2 Tingkat Efisiensi BUS tahun 2014-2019

Kode Bank	Tahun						Rata-Rata	Kesimpulan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
BSM	79%	74%	78%	92%	75%	67%	77%	Cukup Efisien
BRIS	88%	82%	82%	96%	79%	71%	83%	Efisien
BNIS	94%	82%	82%	94%	81%	71%	84%	Efisien
BMI	83%	85%	78%	90%	76%	71%	80%	Efisien
BMS	94%	93%	93%	90%	90%	75%	89%	Efisien
BJBS	94%	92%	93%	100%	93%	80%	92%	Efisien
BPS	100%	100%	88%	100%	86%	75%	91%	Efisien
MSI	100%	93%	100%	83%	100%	100%	96%	Efisien
BCAS	100%	100%	93%	90%	93%	87%	94%	Efisien
BVS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Efisien
BSB	100%	98%	100%	96%	100%	100%	99%	Efisien

Data diolah peneliti

Hasil dari metode DEA dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

1. Kategori 1: 100% (Sangat Efisien)
2. Kategori 2: 80% s/d 99,99% (Efisien)
3. Kategori 3: 60% s/d 79,99% (Cukup Efisien)
4. Kategori 4: 40% s/d 59,99% (Tidak Efisien)
5. Kategori 5: 0% s/d 39,99% (sangat tidak efisien)

4.3.5. Analisis dan Interpretasi

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah input dan output Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pencapaian rata-rata efisiensi Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Disisi lain, ada beberapa BUS yang mengalami inefisiensi.

Ketidakefisienan tersebut disebabkan kurang maksimalnya penggunaan input dan outputnya. Inefisiensi terjadi pada variabel input (DPK, Beban Operasional Lainnya, dan Total Aset) dan variabel outputnya (Pembiayaan dan Pendapatan).

Sutawijaya dan lestari (2009:53) menyatakan bahwa pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas hanya pada hubungan teknik dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Hal tersebut berarti bahwa untuk meningkatkan efisiensi hanya perlu menggunakan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan cara pengendalian dan mengalokasikan sumber daya secara optimal.

Pertama, ketidak efisienan penggunaan input DPK oleh Bank Umum Syariah terlihat dengan jumlah input yang masih lebih besar dibandingkan targetnya. Hal ini menandakan bahwa perannya sebagai input tidak maksimal untuk menghasilkan output. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengalokasikan input DPK yang berlebih ke bagian total aset khususnya aset yang bersifat produktif. Cara ini dapat dilakukan dengan openingkatan jumlah pemberian pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, istishna, dan ijarah. Salah satu cara lainnya adalah dengan menaikkan biaya administrasi pada dana simpanan seperti tabungan, sehingga pendapatan BUS dapat lebih baik lagi. Kenaikan biaya administrasi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan bank agar bank tersebut tetap dapat mampu bersaing.

Variabel input selanjutnya yang perlu diperbaiki yaitu variabel beban operasional. Membengkaknya beban operasional diakibatkan biaya yang dikeluarkan BUS untuk kegiatan operasional masih cukup besar. Terlihat dari rasio BOPO Bank Umum Syariah pada 2015 mengalami kenaikan sebesar 93,53%. Hal ini membuktikan bahwa Bank Umum Syariah kurang efisien dalam mengelola operasionalnya. Bank Umum Syariah jika ingin

mencapai tingkat efisiensi optimum harus menekan biaya untuk kegiatan operasionalnya seperti mengurangi untuk biaya promosi.

Ketiga, ketidakefisienan input total aset terjadi karena penggunaan jumlah aset melebihi target yang dibutuhkan. Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh bank meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah porsi pembiayaan yang merupakan bagian dari total aset itu sendiri. Meningkatnya jumlah pembiayaan akan memperlancar proses intermediasi BUS dan menambah pendapatan operasional terutama yang berasal dari penyaluran dana. Sedangkan aset tetap yang telah dimiliki oleh BUS perlu dikurangi, hanya saja harus digunakan secara maksimal agar tidak terjadi inefisiensi. Pembelian aset tetap sebaiknya harus sejalan dengan penggunaannya secara maksimal sehingga berpengaruh positif terhadap pendapatan bank.

Selain pada variabel input, inefisiensi juga terjadi pada variabel output yaitu total pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya. Jumlah pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan target yang ditentukan Bank Umum Syariah yang belum mencapai tingkat efisiensi optimum. Hal ini disebabkan adanya prinsip kehati-hatian yang diberlakukan oleh Bank Umum Syariah tersebut, namun kelebihan proporsi penerapan prinsipnya akan menghambat target jumlah pembiayaan yang seharusnya disalurkan. Seharusnya penerapan prinsip kehati-hatian yang ada tidak menjadikan jumlah pembiayaan terhambat, namun dapat dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal seperti melemahnya perekonomian Indonesia yang menyebabkan penyaluran pembiayaan belum maksimal. Semua Bank di Indonesia baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah dilanda perlambatan penyaluran kredit atau

pembiayaan dan diiringi pula dengan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPF). Perbankan syariah dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* selalu menghadapi permasalahan klasik yaitu pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah (Debitur) memenuhi kewajibannya membuat kualitas aset (Pembiayaan) bank memburuk dan mengurangi pendapatan bank syariah sehingga BUS tidak dapat mencapai kinerja efisiensi yang optimal.

Inefisiensi juga terjadi pada pendapatan operasional. Jumlah pendapatan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, peningkatan pembiayaan dengan cara inovasi produk dan biaya-biaya pelayanan jasa terkait. Langkah tersebut akan meningkatkan pendapatan operasional. Kedua, penggunaan atau pengalokasian total aset hendaknya digunakan secara optimal sehingga diharapkan pendapatan operasional bank juga akan meningkat. Ketiga, perbaikan kualitas SDM harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan lainnya, karena hal ini berhubungan dengan produktivitas kerja dan kreativitas karyawan (inovasi produk) untuk menghasilkan output yang maksimal.